KEBIJAKAN REVITALISASI PESISIR PANGANDARAN SEBAGAI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PANANJUNG KABUPATEN PANGANDARAN
(Analisis Pembangunan Ekonomi Islam)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah

Oleh:
WINCI ALEN
NIM. 1617201086

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERNYATAAN KEASLIAN i

PENGESAHAN ii

NOTA DINAS PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

ABSTRACK iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 5

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Revitalisasi 17

IAIN PURWOKERTO

1. Pengenrtian Kebijakan Pemerintah 18
2. Aspek-Aspek dalam Kebijakan Pemerintah..... 18
3. Kebijakan Revitalisasi Pesisir 19
B. Ekonomi Pembangunan Islam..... 25
1. Definisi Ekonomi Pembangunan Islam..... 25
2. Ekonomi Pembangunan dalam Islam 30
3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 33
4. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam 34
5. Dimensi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam .. 35
BAB III: KAJIAN PUSTAKA
A. Jenis Penelitian 38
B. Sumber Data 38
C. Teknik Pengumpulan Data 38
D. Teknik Analisis Data 40
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Desa Pananjung 43
1. Sejarah Desa Pananjung 43
2. Letak Geografis 44
3. Gambaran Umum Demografis 44
4. Kondisi Ekonomi..... 47
B. Kebijakan Revitalisasi Pesisir Pangandaran..... 48
1. Peraturan Daerah Terkait Revitalisasi 48
2. Kebijakan Revitalisasi Pesisir Pangandaran..... 49
3. Wujud Revitalisasi 52

IAIN PURWOKERTO

C. Dampak Kebijakan Revitalisasi Bagi Perekonomian..... 53

1. Analisis Program Revitalisasi Pesisir Pangandaran. 53

2. Analisis Pendapatan Pelaku Usaha Peisir Pangandaran.... 57

3. Analisis Ekonomi Pembangunan Islam Terhadap Program Revitalisasi Pesisir Pangandaran 59

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan..... 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (Kementrian Pekerjaan Umum, Pasal 1). Tujuan dilakukannya revitalisasi yaitu guna mewujudkan kawasan atau daerah tertentu yang lebih berkualitas, memenuhi syarat, produktif, dan berkelanjutan (Kementrian Pekerjaan Umum, Pasal 2).

Adanya proses revitalisasi dilakukan guna terciptanya perbaikan kawasan atau bagian kecil dari sebuah kota yang meliputi perbaikan infrastruktur (aspek fisik) guna mengatur sebuah tata ruang yang bisa meningkatkan perekonomian, keamanan, kebersihan, atau berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Pada umumnya, pemerintah atau sebuah instasni/lembaga, melakukan revitalisasi fisik sebagai bagian dari strategi jangka pendek yang bertujuan guna mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi untuk jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kualitas sarana (termasuk juga ruang ruang publik) kota. Melalui revitalisasi ini, menjadi salah satu cara guna melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi dan menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan perbaikan kehidupan yang lebih baik.

IAIN PURWOKERTO

Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian serius dan sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara pun dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah

ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi (Baswir, 2009: 7-8).

Hal ini yang menjadikan daerah Pangandaran menjadi lokasi yang strategis untuk menarik wisatawan dan investor guna meningkatkan pendapatan daerah. Oleh sebab itulah, pembangunan dan investasi terus dilakukan guna tersedianya infrastuktur yang memadai. Proses ini merupakan proses sosial yang melibatkan seluruh elemen. Proses ini pula akan terjadi secara terus menerus, guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang diharapkan akan terus berlangsung dalam jangka panjang.

Upaya tersebut juga tengah diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Upaya-upaya revitalisasi terus dilakukan guna meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten Pangandaran merupakan daerah pesisir di mana terdapat sumber daya laut dan potensi di sektor pariwisata. Seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2015, diatur mengenai Kab. Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata. Salah satu tujuan dibuatnya Perda tersebut yaitu: melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi; serta memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja (Pemda Kab. Pangandaran, Perda. No. 14 Tahun 2015, Pasal 2).

IAIN PURWOKERTO

Melalui program revitalisasi di wilayah pesisir Pangandaran, menjadi sebuah cara atau mekanisme di mana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Misalnya saja Kementrian Pariwisata Republik Indonesia yang menargetkan Pangandaran sebagai Kawasn Ekonomi Khusus (KEK). Proses pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam suatu kawasan. Pangandaran Raya dinilai paling siap untuk dijadikan KEK pertama di Jawa Barat. KEK Pangandaran Raya di kawasan Grand Pangandaran telah siap dengan lahan seluas 196 hektar. Tiga hal yang

diperlukan untuk menunjang Kawasan Ekomomi Khusus Pangandaran Raya, yaitu: Pertama; aksesibilitas seperti infrastruktur jalan dan bandara; Kedua, fasilitas yang meliputi hotel dan destinasi wisata kelas dunia; dan Ketiga, fisibilitas berupa anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan (http://bappeda.jabarprov.go.id/maret-2019-pangandaran-raya-ditargetkan-jadi-kek/, diakses pada 26 Oktober 2019). Hal ini menandakan bahwa daerah Pangandaran memiliki potensi dan sumber daya yang sangat mumpuni.

Oleh sebab itulah, proses revitalisasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pangandaran. Salah satunya di dasa Pananjung. Desa yang merupakan salah satu objek fital bagi sektor pariwisata di Pangandaran tersebut mendapat perhatian yang besar oleh pemerintah. Upaya penataan ruang, penertiban pedagang, perbaikan sarana dan prasarana, serta upaya berbenah di daerah tersebut terus dilakukan.

Sedangkan dalam melakukan revitalisasi kawasan pesisir, pemerintah menargetkan kepada sarana dan pra-sarana yang menunjang destinasi pariwisata. Salah satunya yaitu dengan membuat trotoar yang nyaman bagi para pejalan dan taman di pinggir pantai. Di sisi lain juga Pemerintah Kab. Pangandaran memfokuskan kepada penataan kawasan objek wisata Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran yang merupakan objek vital dari tempat pariwisata di Pangandaran. Anggaran dari proyek penataan kawasan objek wisata pantai Pangandaran tersebut berasal dari bantuan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp 37.319.349.000 (https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/08/29/revitalisasi-pantai-pangandaran-dimulai-ridwan-kamil-dan-jeje-wiradinata-berbagi-cerita, diakses pada 26 Oktober 2019).

Tujuan dilakukannya revitalisasi ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke pantai Pangandaran. Langkah pertama dari program revitalisasi ini yaitu pemindahan pedagang ataupun pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang disediakan/pusat belanja. Dengan adanya pemindahan PKL di area yang telah ditentukan/disediakan oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan

IAIN PURWOKERTO

wisatawan. Seperti yang diungkapkan oleh Ije Wiradinata (Bupati Pangandaran) bahwa pemindahan atau relokasi para pedagang ke pusat-pusat belanja ini dimaksudkan untuk menata area wisata di sepanjang pantai yang selama ini terkesan kumuh, kotor, dan semerawut menjadi sebuah kawasan asri tempat wisatawan bercengkrama menikmati panorama alam laut tanpa terhalangi apa pun. Jika dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan ke Pangandaran terus meningkat, maka yang akan diuntungkan dari dampak tersebut tentunya masyarakat, baik sebagai pelaku langsung atau pun tak langsung di sektor usaha wisata. Karena sektor pariwisata selain berdampak positif pada dunia usaha, pariwisata pun dapat membuka banyak lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang tentu saja berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat. (http://www.pangandarannews.com/2018/02/pemindahan-pedagang-pantai-direspon.html, diakses pada 25 Oktober 2019).

Relokasi pedagang atau PKL ini melibatkan kurang lebih 1600 pedagang yang menjadi sasaran program relokasi ke lokasi yang telah disediakan. Hal ini dilakukan guna penataan ruang serta memberi kemudahan kepada para pedagang untuk berjualan ke tempat yang lebih strategis (https://www.pikiran-rakyat.com/jawabarat/2018/11/02/laporan-khusus-pangandaran-menuju-pantai-kelas-dunia-432592, diakses 24 Oktober 2019). Sehingga dengan tertatanya pedagang tersebut akan memudahkan para wisatawan dalam berbelanja ketika berwisata, di sisi lain juga akan menciptakan keindahan pantai karena kawasan pantai telah tertata dengan rapi. pemindahan pedagang ini juga sekaligus menjadi moment awal penataan kawasan pantai menjadi indah dan bersih.

Dengan menyulap kawasan desa Pananjung serta daerah sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur yang dulunya ditempati oleh para pedagang, kini dikembali pada fungsinya. Yaitu menjadi tempat-tempat strategis untuk aktifitas para wisatawan menikmati pemandangan alam laut, akan menciptakan kenyamanan dan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke pantai Pangandaran.

IAIN PURWOKERTO

Berbagai upaya oleh semua pihak, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun tujuan kesejahteraan ini dalam pelaksanaannya tidaklah mudah tercapai. Banyak kendala-kendala yang menghadang jalannya proses pembangunan yang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan. Pada akhirnya ada sebagian masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan ada sebagian yang belum mendapatkannya (Purwana, 2003: 4).

Proses ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, sehingga bisa tercipta tujuan bersama yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Pangandaran. Dengan sumber daya alam yang dimiliki, juga didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, akan tercipta peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Begitu pula kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila peran aktif pemerintah dalam memajukan industri pariwisata Pangandaran terus dilaksanakan. Salah satunya melalui kebijakan revitalisasi pesisir Pangandaran yang sudah dijalankan oleh pemerintah.

Berangkat dari uraian yang dijelaskan secara singkat dan cenderung bersifat umum di dalam pendahuluan ini, serta masih banyak hal-hal yang perlu dikaji lebih mendalam tentang kebijakan revitalisasi terhadap kehidupan masyarakat Pananjung, menarik bagi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, dalam proposal skripsi ini, penulis akan mengkajinya lebih mendalam dengan judul: *Kebijakan Revitalisasi Pesisir Pangandaran Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran (Analisis Ekonomi Pembangunan Islam).*

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

1. Pengertian Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi pembangunan Islam adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasi

kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah (Beik dan Arsyianti, 2016: 13).

Sedangkan pembangunan ekonomi yang dimaksud dala Islam yaitu proses untuk mengurangi kemiskinan, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan.

Beberapa konsep Ekonomi Pembangunan Islam adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Pendekatan Ekonomi Pembangunan Islam

Filosofi Dasar	Aspek pembangunan	Fokus Utama	Peran Negara
- Tauhid - Khalifah - Tazkiyah	- Fisik materi - Moral spiritual	- Pembangunan manusia - Kesejahteraan sosial	Keseimbangan peran negara dalam perekonomian

Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep ekonomi pembangunan Islam juga dapat dilihat melalui tabel perbandingan berikut :

Tabel I.2 . Perbandingan Konsep Ekonomi

Kapitalis	Sosialis	Islam
- Kebebasan memiliki harta secara perorangan - Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas - Ketimpangan	- Pemilikan harta oleh negara - Kesamaan ekonomi - Disiplin poltik	- Kebebasan individu - Hak terhadap harta - Kesamaan sosial - Jaminan sosial - Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar - Distribusi kekayaan - Larangan memupuk kekayaan - Larangan terhadap organisasi antisosial

Ekonomi Pembangunan merupakan cabang dari ilmu Ekonomi yang bersifat terapan *(applied economics*). Cabang ilmu Ekonomi ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua atau dua abad setelah

IAIN PURWOKERTO

lahirnya ilmu ekonomi pada tahun 1776 Masehi. Ilmu ini diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara yang baru merdeka. Pada umumnya negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karenanya mereka bermaksud mengatasi masalah-masalah tersebut hingga cepat, tepat, dan tuntas (Purwana, 2013: 7).

Berlandaskan kepada kedua-dua sifat dasar ini, maka analisa ekonomi pembangunan dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi (Sukirno, 1999: 11-12).

Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut. Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan (Aedy, 2011: 8-10).

IAIN PURWOKERTO

Berikut ini merupakan beberapa paradigma ekonomi pembangunan yang menjadi dasar dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, di antaranya yaitu (Purwana, 2013: 8-14):

a. Paradigma dengan Pertumbuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)

   Pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya adalah orientasi dari paradigma ini. Dengan memanfaatkan investasi dan teknologi, paradigma ini berharap dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang digunakan

untuk merencanakan atau menghitung pertumbuhan adalah produk nasional bruto (*Gross National Product /GNP*). Sedangkan asumsi yang dipakai adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pemerataan. Paradigma ini justru meningkatkan ketimpangan (*inequality*) yang makin mendalam antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Dengan kata lain, paradigma ini dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi tetapi gagal dalam pemerataan. Padahal yang diharapkan tidak sekedar memaksimalkan produktivitas, tetapi juga mengatasi masalah ketimpangan antar-kelompok.

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)

Paradigma ini muncul untuk merespon kegagalan paradigma yang pertama dengan memasukkan unsur pemerataan di dalamnya agar tidak terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Dengan memanfaatkan investasi, teknologi, dan pengukuran yang sama, paradigma ini juga telah dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

c. Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)

Paradigma dengan kebutuhan pokok sebagai pendekatannya merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kelompok sosial. Paradigma ini berharap bahwa semua semua kelompok target dapat terpenuhi kebutuhannya, seperti pangan, papan (rumah), dan pendidikan, dan kesehatan. Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dapat mengatasi kebutuhan masyarakat dengan baik. Pada saat anggaran terbatas, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya masyarakat kembali tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Akhirnya pardigma ini gagal sebagaimana pada paradigma sebelumnya. Hal ini terjadi

IAIN PURWOKERTO

karena penduduk miskin tidak bisa merubah nasibnya, kecuali dengan mengharap bantuan dari pemerintah.

d. Paradigma dengan Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigm*)

Belajar dari paradigma pembangunan yang mengalami kegagalan sebelumnya, para ahli ekonomi pembangunan, ahli kependudukan, dan ahli sumber daya manusia merumuskan pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Paradigma ini menganggap bahwa pembangunan harus berorientasi pada manusia sebagai obyek dan subyek sekaligus. Paradigma ini membangun manusia secara utuh dan totalitas. Hal ini disebabkan sumber daya manusianya dibangun sesuai dengan kebutuhan fisik (materi) dan kebutuhan psikis (sikap mental). Oleh karenanya SDM menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Mulai dari perencanaan. monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan, yakni: jumlah penduduk, struktur umur, komposisi, penyebaran penduduk, pendapatan dan distribusinya, tingkat pendidikan, mobilitas, dan kesempatan kerja dan kesehatan melibatkan sumber daya manusia.

e. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Suistainable Development Paradigm*)

Studi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan yang diharapkan dalam pembangunan selama ini akan berakhir kurang dari 100 tahun. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang ada akan terkuras habis. Hal pertama yang perlu dicapai yaitu harus menemukan cara untuk penghematan bahan dan produksi.

f. Paradigma Syari'ah (*Syari'ah Paradigm*)

Paradigma ini muncul seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran syari'ah dalam perekonomian. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syari'ah atau hukumhukum Tuhan. Meskipun belum semua

IAIN PURWOKERTO

meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni: langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah di dalamnya.

Sedangkan paradigma pembangunan ekonomi dalam Perspektif Islam merupakan sebuah paradigma yang menyajikan ruang lingkup berfikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dan paradigma pembangunan ekonomi Islam. Kemudian variabel inilah yang menunjukkan perbedaan diantara keduannya, karena perbedaan cara pandang ini kemudian memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi konvensional memiliki pengykuran yang sudah bisa dilakuka, seperti *growth* bagaimna Islam memandang hal tersebut dan bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasinny, serta kebijaka apa yang perlu dilakukan oleh negara disaat pertumbuhan semakin tinggi namun kesenjangan juga tinggi. Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walau dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multimedianasional. Pembanguna ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tetapi segi spiritual dan moral sangat erperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pmbangunan ekonomi (Huda, dkk., 2017: 20-21).

IAIN PURWOKERTO

2. *Maqasid Syariah* Sebagai Indikator Pembangunan

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terciptanya keadilan distribusi, berarti tercapainya minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinnya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan pemeliharaan *maqasid syariah*, yang terdiri dari lima maslahat pokok,

berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinnya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, akan menimbulkn problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera (Saifullah, 2012: 120).

Maqasid syariah, mengalami banyak perubahan dari segiklasifikasi, seperti dimensi keniscayaan (dasar klasifikasi klasik), dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai maqasid, golongan manusia yang meliputi *maqasid* dan tingkat universitas *maqasid*.

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga dari segala sesuatu yang mengencam eksistensinnya. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong ke*maslahatan* (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Selanjutnya, segala esuatu yang melindung lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan (Chapra, 2008: 5).

Sementara Al-Syaitibi menganggap bahwa tujuan syariah (*maqasid syariah*) adalah kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur poko kehidupan manusia dapat dikembangkan, dijaga dan dilestarikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Berdsarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut: “Bagaimana kebijakan revitalisasi pesisir Pangandaran terhadap perekonomian masyarakat Desa Pananjung, Kab. Pangandaran perspektif ekonomi pembangunan Islam?”

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara lebih mendalam kebijakan revitalisasi pesisir Pangandaran khususnya pada area Pantai Timur dan Pantai Barat yang merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam memajukan sektor pariwisata. Kemudian, penulis akan mengkaji bagaimana dampak revitalisasi pesisir Pangandaran terhadap tingkat perekonomian masyarakat Desa Pananjung, Kab. Pangandaran bila dilihat dari sisi ekonomi pembangunan Islam.

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Teoritis

      Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai wacana dan terobosan baru dalam ilmu ekonomi Islam, khususnya yang memiliki kaitan dengan sektor peningkatan perekonomian dan pariwisata sebagai upaya menambah khazanah keilmuan.

   b. Manfaat Praktis

      Manfaat praktis yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, pembaca dapat memahami kebijakan pemerintah terhadap upaya pembenahan sarana dan prasaranan di sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian. *Kedua*, untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnisa Islam, IAIN Purwokerto. *Ketiga*, hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, pemerintah, ataupun lembaga terkait guna memajukan sektor perekonomian dan pariwisata.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka sering disebut dengan teoritik yaitu mengemukakan teori-toeri atau penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti atau kajian tentang ada atau tidaknya studi, buku, atau makalah yang sama atau mirip dengan judul permasalahan yang

penulis susun. Adapun penelitian yang membahas tentang studi peningkatan ekinomi dari sektor pariwisata atau yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Khairunisa Afsari Nurfadilah (2017) yang berjudul: *Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (Studi Kasus Di Kabupaten Pangandaran).* Dalam skirpsi tersebut menjelaskan bagaimana Dinas Pariwisata dan masyarakat dalam menciptakan strategi peningkatan pariwisata pantai Pangandaran yang berbasis masyarakat dan komunitas. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan revitalisasi pantai terhadap peningkatan ekonomi. Sedangkan persamaannya yaitu terdapat pada lokasi, jenis penelitian yaitu kualitatif, dan kajian ilmu ekonomi-pariwisata.

Kedua, skirpsi Famhi Muhammad (2015) yang berjudul: *Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat.* Perbedaan dengan proposal ini yaitu, dalam penelitian tersebut membahas bagaimana proses serta dampak pengelolaan potensi pariwisata pantai Pangandaran yang berbasis masyarakat atau komunitas/*community based taurism* (CBT). Sedangkan dalam proposal ini membahas bagaiamana peningkatan tingkat ekonomi melalui revitalisasi pesisir Pangandaran. Sedangkan persamaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan kajian mengenai bagaimana pengelolaan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah.

IAIN PURWOKERTO

Ketiga, skirpsi Karlina Aprillia (2017) yang berjudul: *Penentuan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Pangandaran.* Perbedaan dengan skripsi tersebut yaitu dalam skirpsi tersebut menganalisis terkait pemekaran daerah yang berpotensi menjadi daerah pusat pertumbuhan antara Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Kedua area tersebut menjadi area pusat kabupaten Pangandaran dan menjadi sektor sentral pariwisata Pangandaran. Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji bagaimana Kecamatan Pangandaran menciptakan sarana dan prasarana dalam

meningkatkan kunjungan pariwisata ke pantai Pangandaran. Sedangkan persamaannya yaitu pada lokasi penelitian.

Keempat, penelitian Witarsa (2015) yang berjudul: *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak.* Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana program Co-Management dalam menanggulangi permasalahan kehidupan masyarakat pesisir di Kab. Pontianak. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana pemerintah mengelola daerah pesisir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel. I.3. Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang Digunakan Sebagai Kajian Pustaka

No	Skripsi/Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Khairunisa Afsari Nurfadilah yang berjudul: *Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (Studi Kasus Di Kabupaten Pangandaran).*	- Objek penelitian - Lokasi penelitian.	- Kajian pada strategi peningkatan pariwisata pantai Pangandaran berbasis masyarakat dan komunitas. - Sedang kan penelitian penulis, akan mengkaji bagaimana kebijakan revitalisasi pantai terhadap peningkatan ekonomi
2	Skirpsi Famhi Muhammad yang berjudul: *Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat*	- Lokasi penelitian - Kajian pengelolaan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah.	- Proses serta dampak pengelolaan potensi pariwisata pantai Pangandaran yang berbasis masyarakat atau komunitas/*community based taurism* (CBT).
3	Skirpsi Karlina Aprillia yang berjudul: *Penentuan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten*	- Lokasi penelitian.	- Kajian pemekaran daerah yang berpotensi menjadi daerah pusat pertumbuhan antara Kecamatan

IAIN PURWOKERTO

	Pangandaran		Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih - Sedang dalam penelitian penulis mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi di desa Pananjung, Kab. Pangandaran.
4	Penelitian Witarsa yang berjudul: *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak*	- Kajian pertumbuhan ekonomi. - Perekonomian masyarakat pesisir.	- Penggunaan program Co-Management dalam menanggulangi permasalahan kehidupan masyarakat pesisir di Kab. Pontianak. - Sedangkan dalam penelitian ini mengukur dari dampak kebijakan revitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Bagian awal dari skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian utama skripsi ini diuraikan dalam lima bab, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kaajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan ekonomi pembangunan yang akan menjadi pisau analisis untuk mengkaji kebijakan revitalisasi daerah pesisir Pangandaran terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Pananjung, Kab. Pangandaran.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penelitian data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN, meliputi pertama kebijakan revitalisasi pesisir pantai Pangandaran. Kedua, dampak kepada masyarakat peningkatan perekonomian masyarakat desa Pananjung, Kab. Pangandaran.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan di bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mendatangi dan mewawancarai subjek penelitian seperti pelaku usaha pesisir pantai Pangandaran diantaraya Pedagang Asongan, Pedagang Baju Pantai, Pedagang Ikan, Penyewa Banana, Nelayan dan juga Pedagang Kaki Lima pesisir pantai Pangandaran mengenai Kebijakan Revitalisasi Pesisir Pantai Pangandaran Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pananjung maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Revitalisasi pantai Pangandaran sudah berjalan dengan baik. Misalnya saja dalam revitalisasi fisik sekitar pantai Pangandaran, saat ini sepanjang jalan pantai Barat dan pantai Timur Pangandaran sudah di bangun area joging streat, gedung khusus untuk para pedagang, kemudian taman-taman produktif pun sudah selesai dibangun.
2. Mayoritas pendapatan pelaku usaha di sekitar pantai Pangandaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum revitalisasi dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Kondisi pantai yang semakain indah dan nyaman, makin banyaknya pengunjung yang datang, tempat atau area berdagang yang semakin banyak.
3. Ditinjuau dari analisis Ekonomi Pembangunan Islam, Pantai Pangandaran termasuk pariwisata Islami, sebab sudah terhindar dari usaha yang dilarang dalam Islam, serta intervensi pemerintah sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Untuk pihak pemerintah Kabupaten Pangandaran diharapkan mampu meningkatkan kinerja untuk memanajemen pengelolaan pariwisata pantai Pangandaran. Dapat mendengarkan aspirasi dan meresponnya dengan segala kondisi serta meningkatkan pengawasan, pengaturan dan pemeliharaan pantai Pangandaran sehingga pelaksanaan program revitalisasi pantai Pangandaran mampu berjalan secara optimal dan

IAIN PURWOKERTO

berdampak positif terhadap pelaku usaha dan juga masyarakat kabupaten Pangandaran.

2. Untuk para pelaku usaha pantai Pangandaran, perlunya kerjasama yang baik dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pemeliharaan pantai dan ketertiban pantai serta perlunya kesadaran para pelaku usaha agar dapat mematuhi segala bentuk peraturan sehingga pencapaian tujuan dari program revitalisasi dapat dirasakan oleh para pelaku usaha dan berjalan optimal dalam jangka panjang.
3. Untuk Akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait Kebijakan Revitalisasi Pesisir Pantai Pangandaran sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

Daftar Pustaka

Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aprillia, Karlina. 2017. *Penentuan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Pangandaran*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Barnadib, Imam. 2004. *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Baswir, Revrisond. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Grafindo.

Chapra, Umar. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqosid Al-syariah*. Jedah: IDB.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Rasearch, Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kementrian Pekerjaan Umum, *Peraturan Mentri Pekerjaan Umum*, Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisas Kawasan.

Iskandar Putong. 2010. *Pengantar Mikro dan Makro.*

Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rodakarya.

Muhammad, Famhi. 2015. *Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

M.Umar Chapra. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*.

Nurfadilah, Khairunisa Afsari. 2017. *Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (Studi Kasus Di Kabupaten Pangandaran)*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

IAIN PURWOKERTO

Purwana, Agung Eko. 2013. “Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Januari-Juni.

Sadono, Sukirno. 1999. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Grafika.

Marzali. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik.*

Saifullah. 2012. *Ekonomi Pembangunan Islam.* Bandung: Gunungjati Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian*. Yogakarta: Gajah Mada University Press.

Adiwarman Karim. 2010. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan).*

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Witarsa. 2015. *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak*. Universitas Tanjungpura, Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015.

Nurul huda dkk, 2017. *Ekonomi Pembanguna Islam*, Rawangun Jakarta : Kencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 32, 33, dan 34.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 2015. Peraturan *Daerah Nomor 14 Tahun Pasal 2.*

Direktorat Jendral. 2000. P3K DKP.

Undang-Undang 1945. *Kesejahteraan Sosial*. Bab XIV.

Al-Qur”an An Nahl dan Qur”an Surat Luqman.

IAIN PURWOKERTO

Internet

http://bappeda.jabarprov.go.id/maret-2019-pangandaran-raya-ditargetkan-jadi-kek/, diakses pada 26 Oktober 2019.

http://www.pangandarannews.com/2018/02/pemindahan-pedagang-pantai-direspon.html, diakses pada 25 Oktober 2019.

https://travel.detik.com/travel-news/d-4685458/ridwan-kamil-konstruksi-revitalisasi-pangandaran-sudah-dimulai, diakses pada 21 Oktober 2019.

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/11/02/laporan-khusus-pangandaran-menuju-pantai-kelas-dunia-432592, diakses 24 Oktober 2019.

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/08/29/revitalisasi-pantai-pangandaran-dimulai-ridwan-kamil-dan-jeje-wiradinata-berbagi-cerita, diakses pada 26 Oktober 2019.

www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/09/pengertian-kebijakan.html, diakses pada 23 Maret 2020.

http://repository.uin-suska.ac.id/6723/4/BAB%20III.pdf, diakses pada 23 Maret 2020.

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2015_1_1232_Bab2.pdf). Berbeda dengan definsi, diakses pad 23 Maret 2020.

IAIN PURWOKERTO